

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini isu mengenai keberlanjutan pada sektor pertanian menjadi isu utama yang sangat penting, karena visi Indonesia pada tahun 2045 menempatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu pilarnya. Pada pilar pembangunan ekonomi ini salah satunya ada tujuan untuk memantapkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dicapai dengan adanya pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agricultural development*). *Technical Advisory Community of the CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research)* (Reijntjes dkk. 1992), berpendapat bahwa pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam.

Keberlanjutan agribisnis merupakan pengembangan konsep dari pertanian berkelanjutan. Adapun pengembangan konsep pertanian berkelanjutan dilihat dari lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi ekologi atau lingkungan, dimensi teknologi serta dimensi kelembagaan. Peran kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan agribisnis sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Kelembagaan agribisnis membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga petani dapat lebih efektif dalam mengembangkan usahanya (Oktaviani dan Lidyana, 2023).

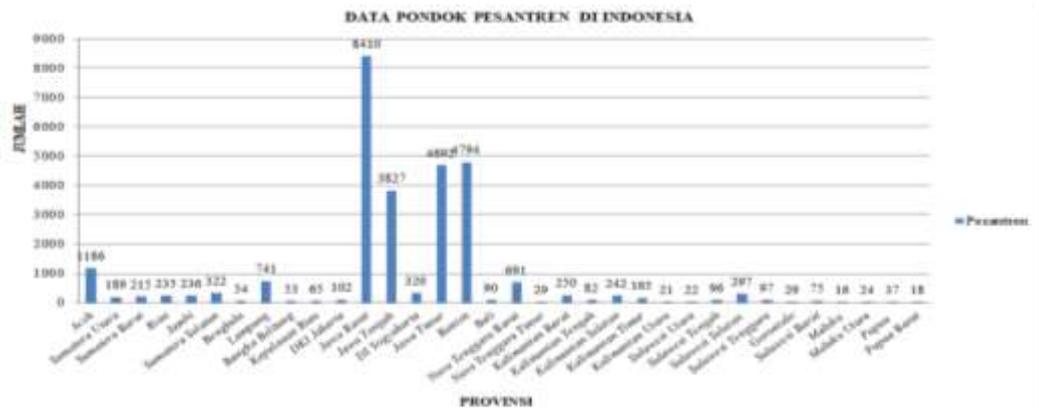
Kelembagaan merupakan organisasi atau kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Sejati dan Supriadi 2015). Kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan setiap orang atau organisasi mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984). Sementara itu Effendy dkk (2020) menegaskan bahwa kelembagaan yaitu organisasi yang

mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif, mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Hubungan kelembagaan dengan pondok pesantren memiliki beberapa aspek yang terkait dengan struktur, fungsi, dan pengembangan lembaga pendidikan islam.

Pondok pesantren merupakan bentuk lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial yang telah hidup dan berkembang menyebar di tengah masyarakat Indonesia (Hafid, 2021). Pondok pesantren juga diyakini dapat memberi kontribusi lebih aktif dalam perjuangan melawan ketimpangan sosial, ekonomi dan budaya, khususnya di wilayah pedesaan (Ahmad, 2018). Tanpa disadari diantara banyaknya pesantren di Indonesia, rupanya telah banyak pesantren yang berkecimpung dalam pembangunan dan bergerak melakukan pembaharuan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar, terutama keterlibatan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Menurut UU Nomor 18 Pasal 43 bahwa “pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat”.

Pesantren agribisnis adalah lembaga pendidikan islam yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam bidang agribisnis (Ansori, 2014). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan praktik pertanian yang berkelanjutan, pesantren agribisnis dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan pertanian dan memajukan masyarakat pedesaan. Karakteristik pesantren agribisnis, seperti jenis usaha agribisnis, skala usaha agribisnis, fasilitas pesantren, pembiayaan pesantren, dan kepemimpinan dapat memiliki pengaruh terhadap pengembangan santri di pesantren dalam bidang agribisnis (Hamzah, 2015).

Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) Kementerian Agama RI (2022), sebaran pesantren di Indonesia terdapat kurang lebih sebanyak 27.722 pesantren dengan jumlah santri mencapai 4.175.531 orang. Penyebaran pondok pesantren di seluruh Indonesia tentunya dengan beragam letak geografis yang bervariasi dari pedesaan (*rural area*) hingga pada kawasan perkotaan (*urban*), yang dapat dilihat lebih detail pada Gambar 1:



(Sumber : Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, 2022)

Gambar 1. Sebaran Pondok Pesantren Di Indonesia 2022

Berdasarkan gambar 1, Jawa Barat merupakan provinsi dengan sebaran pesantren paling banyak. Oleh karena itu, salah satu kabupaten atau kota yang terkenal dengan sebutan sebagai kota santri adalah Tasikmalaya. Keberadaan pesantren di Tasikmalaya saat ini mencapai 1.587 pondok pesantren, dengan rincian 1.344 Pondok Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya dan 243 Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya. Hampir semua pondok pesantren tumbuh dan berkembang secara alamiah sejalan dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Dengan demikian dapat dilihat data jumlah pondok pesantren yang terdapat di Jawa Barat pada Gambar 2 :

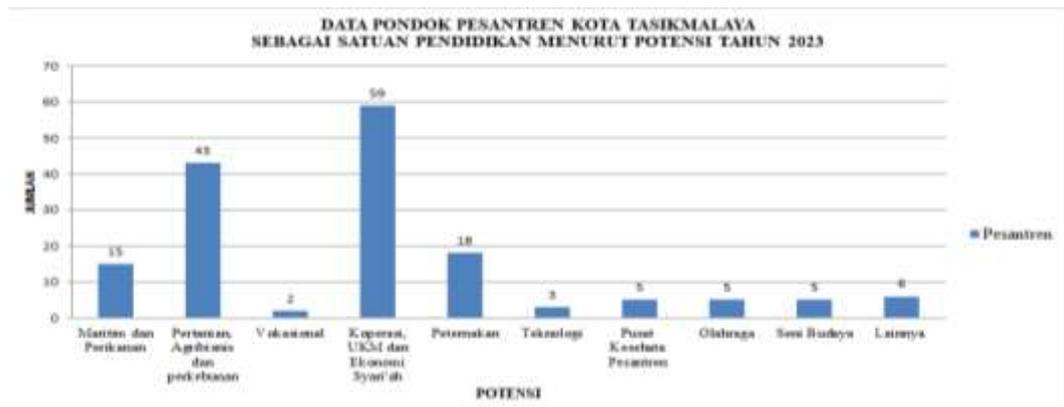


(Sumber : Open Data Jabar, 2021)

Gambar 2. Sebaran Pondok Pesantren Di Jawa Barat 2021

Berdasarkan Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki potensi pesantren yang dapat dikembangkan untuk kegiatan agribisnis. Hal ini didukung dengan data pondok pesantren yang tidak hanya menjalankan pendidikan agama, namun mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan

pendidikan keterampilan, hal ini bertujuan untuk mengasah kemampuan para santri, maka berikut datanya dapat dilihat di Gambar 3:



(Sumber : PPID Kemenag Jabar, 2023)

Gambar 3. Data Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan Menurut Potensi Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut pesantren yang menjalankan kegiatan agribisnis, pertanian dan perkebunan tinggi dengan total 43 pesantren. hal ini menunjukkan bahwa kota Tasikmalaya memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan agribisnis. Salah satu pesantren yang sudah menjalankan kegiatan agribisnis adalah pondok pesantren *Islamic Leader School (ILS)*.

Pesantren *Islamic Leader School (ILS)* adalah salah satu pesantren di Tasikmalaya, lebih tepatnya berlokasi di Jl. Bandung Blok 2A No. 140 Perum Kotabaru Cibeureum Kota Tasikmalaya. Pesantren ini memiliki pendidikan formal dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Namun untuk santri yang mukim atau tinggal di pondok hanya santri tingkat SMP dan SMA. Pondok pesantren ILS juga memiliki program unggulan baik pada bidang akademik, program tahfidz dan program kekhayatan. Pada program kekhayatan, para santri diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan kepentingan mereka di masa depan. Program kekhayatan ini salah satunya program kekhayatan agribisnis. Program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan belajar langsung di lapangan. Kegiatan ini diantaranya mencangkok, membuat pupuk, membuat kompos, menyetek, pembibitan, penyiraman dan lain-lain. Tanaman yang di budidaya diantaranya sacha inchi, selada, cabe, kangkung, bayam, dan alpukat. Dengan demikian, pesantren *Islamic Leader School* mempunyai potensi yang cukup signifikan dalam upaya menjadikan pesantren yang mandiri ekonomi.

Kegiatan pesantren terkait dengan program agribisnis tersebut diperlukan kualitas kemampuan dan keterampilan santri untuk keberlanjutan kegiatan agribisnis di pesantren. Hal ini baik dilihat dampak secara ekonomi, dampak secara sosial dan dampak secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah kegiatan program agribisnis di pondok pesantren *Islamic Leader School* (ILS) ini berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih tentang karakteristik pondok pesantren agribisnis dengan tujuan kemandirian ekonomi pesantren dan bagaimana keberlanjutan kegiatan agribisnis yang dijalankan sehingga mendorong keberlanjutan pesantren.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana tingkat karakteristik pondok pesantren agribisnis *Islamic Leader School* (ILS) Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana tingkat keberlanjutan agribisnis di Pondok Pesantren *Islamic Leader School* (ILS) Kota Tasikmalaya?
3. Apakah terdapat hubungan antara karakteristik pesantren agribisnis dengan keberlanjutan agribisnis di pondok pesantren *Islamic Leader School* (ILS) Kota Tasikmalaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut

1. Menganalisis tingkat karakteristik pondok pesantren agribisnis *Islamic Leader School* (ILS) Kota Tasikmalaya.
2. Menganalisis tingkat keberlanjutan agribisnis di Pondok Pesantren *Islamic Leader School* (ILS) Kota Tasikmalaya.
3. Menganalisis hubungan antara karakteristik Pesantren Agribisnis dengan keberlanjutan agribisnis di pondok pesantren *Islamic Leader School* (ILS) Kota Tasikmalaya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan keyakinan bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, sosial dan kemasyarakatan memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dengan tetap menjadikan bidang pertanian atau agribisnis sebagai sektor kegiatan ekonomi utama. Secara khusus penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis selaku peneliti, mahasiswa, dan perguruan tinggi, pesantren, maupun pemerintah selaku pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan bagi pesantren.

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hubungan antara pesantren agribisnis dengan keberlanjutan agribisnis.

2. Bagi Pesantren

Keterlibatan pesantren dalam penelitian ini diharapkan dapat melahirkan kemandirian bagi pesantren dalam berbagai aktivitas salah satunya dalam sektor agribisnis yang dimilikinya serta langkah-langkah strategis dalam aktivitas sosial ekonominya, sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar pesantren.

3. Bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami hubungan karakteristik pondok pesantren agribisnis dengan keberlanjutan agribisnis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian lanjutan terkait dengan tema yang ada.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan dalam pemberdayaan yang melibatkan pesantren terkait dengan potensi yang dimilikinya.